

PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

DI DESA KUMENDUNG, KECAMATAN MUNCAR

Oleh
DESSTYA INDRA SETYA. NIM 1714041023
Program Studi
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 di Desa Kumendung, (2) Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PTS, (3) Solusi untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan PTS. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif. Teknik penentuan subjek menggunakan *purposive sampling*. Subjek dari penelitian adalah Kepala Desa Kumendung, Sekertaris Desa, Panitia Ajudikasi dan Satuan Tugas, serta Masyarakat Desa Kumendung yang mengikuti PTS. Objek dari penelitian ini adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018. Lokasi penelitian adalah di Desa Kumendung, dan Kantor Pertanahan Kab Banyuwangi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara (*interview guide*), dan teknik dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan (1) Pelaksanaan PTS di Desa kumendung sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan tahap-tahap dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 6 Tahun 2018, (2) Terdapat hambatan dalam PTS di desa kumendung yaitu:(a) Adanya covid-19, sehingga target PTS tidak dapat terpenuhi, (b) Masih terdapat tanah yang menjadi sengketa mengenai penetapan batas-batas yang akan diukur, (c) Masih kurangnya sumber daya manusia di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, (3) Solusi untuk mengatasi hambatan yang terjadi: (a) BPN Kab Banyuwangi menurunkan target capaian dan akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk perkembangan pelaksanaannya,(b) Kepala desa mengundang para ahli waris datang ke kantor desa untuk diajak musyawarah, serta menandatangani berita musyawarah, (c) BPN Kabupaten Banyuwangi berupaya mengoptimalkan sumber daya manusia dengan melakukan mobilisasi yang diambil dari Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jawa Timur.

Kata Kunci: Pendaftaran tanah, sistematis lengkap, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018.

IMPLEMENTATION OF A COMPLETE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION PROGRAM IN KUMENDUNG VILLAGE, MUNCAR DISTRICT

By

DESSTYA INDRA SETYA. NIM 1714041023

Study program

Pancasila and civic education

ABSTRACT

This research aims to determine (1) Implementation of complete systematic land registration based on Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency No. 6 of 2018 in Kumendung Village, (2) Obstacles faced in implementing PTSL, (3) Solutions to overcome obstacles that occur in implementing PTSL. The type of research used is descriptive research. The subject determination technique uses purposive sampling. The subjects of the research were the Kumendung Village Head, Village Secretary, Adjudication Committee and Task Force, as well as the Kumendung Village Community who took part in PTSL. The object of this research is the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency No. 6 of 2018. The research location is in Kumendung Village, and the Banyuwangi District Land Office. The data collection techniques used in this research are observation techniques, interview techniques and documentation techniques. The results of this research show (1) The implementation of PTSL in Kumendung Village has gone well, in accordance with the stages in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency No. 6 of 2018, (2) There are obstacles to PTSL in Kumendung Village namely: (a) The presence of Covid-19, so that the PTSL target cannot be met, (b) There is still land that is in dispute regarding the determination of the boundaries to be measured, (c) There is still a lack of human resources at the Banyuwangi Regency Land Office, (3) Solutions to overcome the obstacles that occur: (a) Banyuwangi Regency BPN lowers the achievement targets and will continue to coordinate with the Banyuwangi Regency Government for progress on implementation, (b) The village head invites the heirs to come to the village office for deliberation and to sign the news deliberation, (c) BPN Banyuwangi Regency seeks to optimize human resources by mobilizing those taken from the East Java Provincial Land Office.

Keywords: Land registration, complete systematic, Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency No. 6 of 2018.